



WARTA HUKUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
2023

Oknum Polisi Terseret Kasus Subang?

BANDUNG, (PR)-

Polda Jabar akan memeriksa seorang perwira polisi dan anggota bantuan polisi (banpol) terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang.

Keduanya diperiksa karena datang ketika awal mula kejadian. Mereka dipentahkan "sesorang" untuk membersihkan kamar mandi dan mengambil beberapa barang di rumah dan mobil.

"Kami telah melakukan pemeriksaan kembali ke tempat rumah yaitu Yoris, Muljana (adik tersangka), seorang anggota banpol, dan seorang perwira polisi. Di sana, kami dapatkan beberapa barang seperti ponsel, memori card, laptop, hingga stik golf. Stik golf kami stwab ulang karena ada DNA korban di situ," kata Direskrim-

Polda Jabar, Komisaris Besar Surawan Surawan, di Mapolda Jabar, Jalan Sorkarno Hatta, Selasa (1/11/2023).

Surawan berharap, dari pemeriksaan dua saksi itu, Polda Jabar bisa mendapat informasi terkait pihak yang menyuruh keduanya membersihkan TKP. "Kita ingin mendapat keterangan yang pasti dari mereka, siapa yang memerintahkan, dan apa tujuan utamanya," ujarnya.

Surawan mengatakan, seorang perwira polisi yang diperiksa itu, belum tentu terlibat dalam kasus tersebut. Namun, pemeriksaan tetap dilakukan untuk mencari tahu terkait dugaan keterlibatan oknum polisi. "Ini yang kita dalam. Kita periksa semua hari ini dan diminta keterangan," katanya.

Muncul informasi bahwa ada pemberian uang dari salah seorang tersangka kepada anggota polisi agar kasus tidak dilanjutkan. "Informasi ini belum secara resmi kami terima dan akan dilakukannya dari pemeriksaan saksi dan tersangka," ucapnya.

Soal lamanya kasus terungkap, kata Surawan, karena barang bukti yang ada di TKP awal, kurang sempurna. Sehingga butuh para ahli untuk merangkai bagaimana pembunuhan ini bisa terjadi.

Bercak darah

Pada kesempatan itu, Surawan menuturkan, Polda Jabar juga menemukan bercak darah misterius pada bagian belakang mobil Alphard yang menjadi lokasi penemuan jenazah para korban. "Di bawah jenazah itu

ditemukan DNA Mr X dan itu dugaan yang masih kita dalami," katanya.

Sejumlah saksi yang diinterogasi oleh polisi, sudah dites DNA. Namun, belum ada sampel darah yang cocok dengan bercak darah yang ditemukan di mobil. "Belum ada kecekan," ucapnya.

Terkait kemungkinannya ada tersangka baru, Surawan belum dapat memastikan. Polda Jabar pun masih melakukan rangkaian penyelidikan dengan meminta keterangan dari para tersangka dan melakukan olah TKP ulang.

"Kita masih meneliti semua keterangan saksi dan TKP, barang buktinya. Itu kita lakukan seperti itu. Kita ulang lagi ke TKP," katanya. (Mochamad Iqbal Maulud)**

JDIH Sekretariat DPRD Pangandaran Raih Peringkat Terbaik Tingkat Nasional

PARIGI - Setelah mendapatkan penganugerahan Terbaik ke II Tingkat Provinsi Jawa Barat pada bulan September 2023 lalu, kini Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran kembali meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) peringkat Terbaik ke I (satu).

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin HMM, ini merupakan prestasi yang luar biasa di raih Sekretariat DPRD sebagai kado Milangkala Kabupaten Pangandaran ke 11 tahun 2023.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Lalyo kepada Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin HMM di Ballroom Hotel Aston Kartika Jakarta, Jln Kyal Tapa Grogol Jakarta Pusat pada hari Kamis, 12 Oktober 2023 pekan lalu.

Penyerahan penghargaan dihadiri oleh seluruh anggota JDIH yang telah terintegrasi dengan JDIHN, sebanyak 1024 anggota JDIHN dengan 13 kategori, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia dan lembaga lain.

Asep Noordin mengatakan, JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran meraih penghargaan Terbaik pada penganugerahan JDIHN Awards Tingkat Nasional sebagai peringkat Terbaik ke 1, menggeser Kabupaten Bataang yang selama ini beberapa kali meraih peringkat Terbaik ke 1 Nasional.

"Alhamdulillah pada tahun 2023, kita dapat meraih penganugerahan peringkat Terbaik ke 1 Nasional," ucap Asep.

Menurut Asep, ini merupakan prestasi yang luar biasa dan merupakan kado Terbaik untuk Kabupaten Pangandaran dalam rangka Milangkala ke 11 tahun 2023. JDIHN Award merupakan prasarana pembinaan bidang hukum dalam menghadapi tantangan problematik hukum, apalagi saat ini sedang dalam menghadapi tahun politik yang di mungkinkan banyak permasalahan permasalahan hukum yang perlu diselesaikan.

Kata Asep, JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran ini berisi informasi terkait regulasi meliputi Peraturan Daerah, mulai dari penyusunan Proppenda, Naskah Akademik, pembahasan Raperda sampai penetapannya. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, risalah-risalah rapat pembahasan raperda agenda kegiatan DPRD, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah.

Selain itu, kata Asep, setiap produk hukum yang sudah tersusun di Web JDIH, sudah memiliki



KETUA DPRD Pangandaran Asep Noordin HMM saat menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Lalyo di Jakarta/Dok. Humas DPRD Pangandaran.



Abstrak, sehingga masyarakat, pimpinan dan anggota DPRD serta yang lainnya dapat mengetahui lebih cepat isi dari produk hukum dan yang lainnya.

"Dengan demikian tentu lebih mempercepat pemahaman terhadap produk hukum yang ingin kita ketahui," ujarnya.

Kota Asep, pelaksanaan JDIHN Award tingkat Nasional merupakan dukungan untuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Perpres tersebut mengamanatkan agar JDIH dapat menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah maupun instansi lainnya.

"BPHN selaku pembina JDIH, menyelenggarakan JDIHN AWARD dengan beberapa tahapan dan mekanisme penilaian yang di targetkan tentu yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggota JDIHN yang telah terintegrasi dengan JDIHN BPHN," katanya.

Pembenan Anugerah JDIHN atau JDIHN Awards bagi Anggota JDIHN sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja dalam mengelola JDIH

"Mempertahankan prestasi Tentu merupakan hal yang tidak gampang, perlu dedikasi dan kerja keras yang luar biasa, di dukung dengan team work yang kompak dan solid," ungkap Asep.

Sementara Kepala BPHN Prof Dr. Widodo Ekatyahjana dalam sambutannya menyampaikan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sarana membangun hukum nasional sebagai perekat dalam mempersatu bangsa melalui transformasi digital, dengan slogan Satu Data Untuk Semua. (Agus Kusnadi)**

Pelaku Soap Pimpinan DPRD Bekasi Ditahan

CIKARANG, (PR)-

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menahan RS, tersangka kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, SN. Perempuan yang bekerja sebagai kontraktor pekerjaan infrastruktur itu dijemput paksa setelah berulang kali mangkir dan panggilan.

RS dijemput paksa di kediaman kerabatnya di Kabupaten Bogor Senin (30/10/2023) sekitar pukul 22.00. RS dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi lalu menjalani pemeriksaan secara maraton sebagai saksi.

Setelah pemeriksaan, penyidik mengklarifikasi perkara hingga akhirnya menaikkan status RS jadi tersangka. "Kami tetapkan tersangka Selasa (31/10/2023) sore pukul 3 sore," kata Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Ricky Setiawan Anas, Rabu (1/12/2023).

Penahanan RS menjadi drama tersendiri pada penyidikan dugaan gratifikasi terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi ini. Penyidik sebenarnya telah sejak lama memanggil RS sebagai saksi namun tidak kunjung hadir. Setelah berulang kali menghantar, pelakornya akhirnya berhenti. Untuk itu, setelah berhasil dijemput RS diperiksa hingga akhirnya ditahan sebagai tersangka.

Dari hasil pemeriksaan, lanjut Ricky, ada pihak yang berupaya mencegah kehadiran RS di kejaksaan. Hanya, tidak dijelaskan pihak yang menghambat pemeriksaan itu.

"Istilahnya, dia (RS) ada yang memberikan informasi 'udah gak usah hadir, nanti kalau kamu hadir kamu begini-nibegini' padahal enggak seperti itu. Sampai enam kali memanggil tidak hadir, lalu akhirnya kamu jemput paksa," ucap dia.

Seperti diketahui, pengusutan kasus gratifikasi ini didasarkan atas laporan sejumlah elemen masyarakat pada Senin (7/8/2023). Dalam laporan, sebenarnya terlapat dua anggota DPRD yakni SL dan DT yang dilaporkan terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa gratifikasi. Keduanya diduga menerima gratifikasi dari seseorang berinisial RS. (Tommi Andryandi)**

Eks Menkominfo Klaim Kasusnya Sarat Politik

JAKARTA, (PR).-

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan bahwa dirinya merasa dijadikan keranjang sampah oleh para saksi yang membenarkan keterangan dalam pengusutan perkara dugaan korupsi BTS 4G.

Johnny menyebut para saksi tersebut sedang mencari jalan sebatut agar tidak dijadikan sebagai tersangka karena saksi-saksi tersebut tidak segan memberikan keterangan yang dimilainya sebagai fitnah.

"Agar mereka sendiri tidak dijadikan tersangka, maka tidak segan-segan dalam persidangan memberikan keterangan atau lebih tepatnya fitnah kepada saya, dengan melampirkan semua kesalahan kepada saya dan menjadikan saya keranjang sampah kesalahan," ucap Johnny di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023), seperti dilansir Antara.

Johnny mengungkapkan hal tersebut dalam nota pembelaan (pleidoid) pribadinya atas tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam perkara dugaan korupsi BTS 4G Kemenkominfo.

Terkait tuntutan JPU yang mengatakan bahwa Johnny dipercaya sebesar Rp 17.848.308.000,00, ia merasa terzalimi. Johnny mengaku tidak mengetahui dari mana sumber dana yang dituduhkan kepada dirinya itu berasal. "Saya benar-benar merasa diperlakukan dengan semena-mena dan sangat tidak adil oleh penuntut umum," ucapnya.

Dalam nota pembelaan itu, Johnny juga mempertanyakan penetapan tersangka kepada dirinya. Dia menyebut sejak awal ditetapkan sebagai tersangka, anggapan bahwa penetapan tersangka tersebut sarat situasi politik tidak dapat dimungkiri.

Meski demikian, menurut Johnny, ia berkomitmen akan menghadapi proses hukum yang sedang berlangsung. Ia mengaku tidak akan dan tidak perlu menggunakan alasan-alasan politik dalam pembelaan dirinya.

Periksa anggota BPK

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota III Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi (AQ) terkait dugaan korupsi base transceiver station (BTS) 4G pada Bakti Kominfo, Jumat (3/11/2023).

"Menurut panggilan yang dilayangkan oleh Direktur Penyidikan (Dirdik), pemeriksaan hari Jumat ini," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di Jakarta, Rabu (1/11/2023), seperti dilansir Antara.

Pemeriksaan terhadap anggota BPK tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, sesuai pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk diketahui, dalam perkara korupsi BTS ini, Kejagung sudah menetapkan 15 orang sebagai tersangka termasuk Direktur Bakti Kominfo Anang Achmad Latief. (Humina)***

Alex Tirta Mangkir

Kasus Pemerasan Pimpinan KPK

JAKARTA, (PR).-

Ketua Harian Pengurus Provinsi Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) DKI Jakarta Tirta Juwana Darmadji (Alex Tirta) tak memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Rabu (1/11/2023).

"Alex Tirta berhalangan hadir pada jadwal pemeriksaan hari ini yang sudah terjadwal pada pukul 14.00 karena alasan kesehatan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/11/2023), seperti dilansir Antara.

Ade Safri menjelaskan, ketidakhadiran yang bersangkutan telah disampaikan oleh penasihat hukum Alex Tirta yang tiba di gedung Promoter lantai 21 (ruang periksa Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya) pada pukul 13.45 dan telah meminta penjadwalan ulang.

"Meminta dijadwalkan ulang untuk pemeriksaan terhadap Alex Tirta, menjadi Jumat, 3 November 2023

pukul 9.00 di ruang periksa Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," ucapnya.

Sementara untuk dua saksi lainnya, Ade Safri menjelaskan telah hadir memenuhi panggilan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

"Sudah datang dan dimulai pemeriksaan pada pukul 10.00. Yang satu sudah selesai pukul 12.30, yaitu ajudan mantan Menteri Pertanian SYL dan yang satu masih berlangsung pemeriksaan," kata Ade Safri.

Seperi diketahui, Alex Tirta dipanggil Polda terkait penyewa rumah rehat Firlu Bahuri di Jalan Kertanegara.

Sebelumnya, polisi telah menggeledah rumah tersebut terkait kasus pemerasan yang diduga melibatkan pimpinan KPK terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo

"Pemilik rumah di Jalan Kertanegara Nomor 46 adalah E dan yang menyewa rumah dari E adalah Alex Tirta," kata Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Ade Safri menambahkan, Alex Tirta menyewa rumah tersebut seharga kisaran Rp 650 juta per tahun. Namun,

pengacara Firlu membantah biaya sewa rumah tersebut dibayarkan Alex, melainkan dibayar Firlu lewat asisten pribadinya. Selain itu, biaya sewa pun disebut pengacara Firlu bukan Rp 650 juta per tahun, melainkan di bawah 100 juta per tahunnya.

Lupa

Dalam kesempatan terpisah, ketua tim penasehat hukum Syahrul Yasin Limpo (SYL), Jamaluddin Koedoeboen, mengatakan bahwa kbenyanya lupa saat ditanya beberapa pertanyaan salah satunya soal pertemuan dengan Ketua KPK Firlu Bahuri di rumah Kertanegara Nomor 46 Jakarta Selatan.

"Memang tadi ada pertanyaan mengarah ke arah sana. Cuma, ada beberapa yang beliau (SYL) sudah lupa dan ada beberapa pertanyaan yang beliau sendiri tidak ada pada posisi itu untuk mengetahui," kata Jamaluddin saat ditemui wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (31/10/2023) malam.

Jamaluddin menyebut kliennya diperiksa selama kurang lebih enam jam dengan 22 pertanyaan, di antaranya mengarah pada pertemuan di Kertanegara dan terkait dengan penyerahan uang kepada Firlu Bahuri.

"Menurut dia, apa yang ditanyakan penyidik subseksi Polda Metro Jaya dan Syahrul Koedoeboen merupakan pengulangan dari pertanyaan pemeriksaan sebelumnya. Menurut Mentri SYL sudah diperiksa tiga kali selama proses penyelidikan dan dua kali selama penyidikan di Polda Metro Jaya.

Pertanyaan yang ditanyakan itu, kata dia, seperti apakah pernah bertemu, apakah pernah ada penyerahan uang seperti yang sudah dibicarakan, dan terkait apa yang diketahui dan diakui SYL, termasuk soal jabatan yang pernah diangku mantan Menteri Pertanian itu.

Tapi, itu pertanyaan pengulangan. Tadi, bebas juga di jawab sebelumnya sudah mengesakan bahwa tidak ada seperti itu, jadi mengapa konsistensinya itu saja sebelumnya," kata Jamaluddin.

Jamaluddin menegaskan bahwa kbenyanya pada pemeriksaan hari Selasa (31/10/2023) berstatus sebagai saksi korban.

Selain SYL, penyidik memeriksa dua saksi lain, yaitu Kapolrestabes Semarang Komisaris Besar Iwan Anwar (IA) dan Direktur Aki dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementerian Mubandamad Hatta (MHL) (Humbara)."*